



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAHTIAR BAHARUDDIN**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL**
3. NHK : **462502**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.444.722.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 620.000.000
2. Tanah Seluas 472 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 944.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 340.940.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 339 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.188.900.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 324.320.000
6. Tanah Seluas 64 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 198.400.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 494.000.000
8. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 201.300.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 345.426.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 345.426.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 442.010.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.496.000.000
1. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS A/T / SCOOTER Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 46.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA TOYOTA LAD CRUISER PRADO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	130.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.204.003.869
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	8.274.725.869
III. HUTANG	Rp.	2.241.947.100
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.032.778.769

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.